BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga, yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam perspektif pembangunan, terdapat periodisasi perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang (25 tahunan) yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), perencanaan jangka menengah (5 tahunan) yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan penjabaran perencanaan (5 tahunan) yang ada di SKPD dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) dan perencanan jangka pendek (tahunan) yang ada di SKPD dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA). Rencana Kerja Dinpermasdes merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional dibandingkan dengan dokumen Renstra.

Komponen-komponen yang terkandung dalam Rancangan Awal Renja 2025 meliputi sasaran strategis dan sasaran program yang akan dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan. Pada dasarnya Renja tahun

2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2025. Target kinerja mempresentasikan nilai kualitatitif yang harus dicapai selama tahun 2025 dan semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran.

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 mengacu pada arah kebijakan RKPD dan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 dan juga didasarkan pada antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi, masukan dari berbagai stakeholder dan dinamika perkembangan pembangunan terutama di lingkungan strategis pedesaan serta sinkronisasi Program dan Kegiatan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja yang dilaksanakan Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Purbalingga.

1.2. Landasan Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahu n 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *tentang* perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130)
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kapubaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 06);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 140 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 140 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2021 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan Program dan Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketepatan strategi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi. Pembuatan Rencana Kerja ini mempunyai maksud :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugasnya sehingga sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui perjanjian

kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan keuangan daerah dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam APBD tahun 2025.

2. Sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan program kegiatan, sekaligus sebagai tolak ukur di setiap bidang pada Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2025.

b. Tujuan

Penyusunan Rancangan Awal rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2025 mempunyai tujuan :

1. Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga yang termuat dalam RPJMD tahu 2021-2026 terutama di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Menjabarkan rencana strategis ke rencana operasional
3. Sebagai instrumen untuk mengukur capaian target kinerja penyelenggaraan kegiatan pada Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMASDES TAHUN 2022.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinpermasdes Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinpermasdes.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinpermasdes

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinpermasdes.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinpermasdes

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMASDES TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dan waktu yang ditentukan dalam upaya melaksanakan seluruh program dan kegiatan tersebut. Secara umum capaian kinerja program dan kegiatan Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga tahun 2023 dapat dilaksanakan dan mendekati target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023 Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga mengelola APBD sebesar Rp. 8.323.336.000,- yang terdiri dari :

- Belanja Operasi Rp. 8.323.336.000,-

Dengan realisasi sebesar Rp. 4.411.804.457,- atau 53,01 % yang terdiri dari :

- Belanja Operasi Rp. 4.411.804.457,-

Realisasi belanja operasi merupakan pengeluaran untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 sejumlah 5 program, 10 kegiatan dan 44 sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

Disamping melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten sesuai dengan tupoksi, Dinpermasdes juga melaksanakan fasilitasi dana bantuan untuk desa yang bersumber dari dana APBD Kabupaten berupa ADD dan Bantuan Keuangan Khusus, Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari APBD Provinsi Jawa

Tengah dan dana APBN berupa dana transfer Dana Desa kepada pemerintah desa.

Adapun penjelasan terperinci anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Khusus APBD Kabupaten, bantuan keuangan bagi pemerintah desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan dana transfer Dana Desa dari APBN tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa (ADD).

   Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 190 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengaloksian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023, maka Alokasi Dana Desa tahun 2023 adalah sebesar Rp.254.557.923,000,- (dua ratus lima puluh empat milyar lima ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dialokasikan untuk 224 desa se Kabupaten Purbalingga. Adapun realisasi penyalurannya adalah sebesar Rp.254.557.923,000, atau 100 %.

2. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Desa.

   Pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang fasilitasi penyaluran dan pelaporannya dilaksanakan oleh OPD terkait termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun dana bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa yang difasilitasi oleh Dinpermasdes Tahun 2022 sejumlah 315 titik kegiatan dengan pagu anggaran Rp.5.000.000 sampai dengan Rp.200.000.000,- Total bantuan Rp. 29.468.500.000,- (dua puluh Sembilan milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu

rupiah). Bantuan tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan rabat beton, pengaspalan jalan, pembuatan talud, pembuatan saluran

3. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten dan Desa memfasilitasi penyaluran dana untuk Pemerintah Desa sebanyak 280 titik sebesar Rp. 36.805.000.000,- (Tiga puluh enam milyar delapan ratus lima juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.36.805.000.000 (Tiga puluh enam milyar delapan ratus lima juta rupiah) atau sebesar 100%

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan baik dari anggaran APBD Kabupaten yang dikelola langsung Dinpermasdes, Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Purbalingga, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan Dana Transfer dari APBN sebagaimana tersebut diatas terdapat beberapa indikator kinerja yang telah sesuai dengan target yang telah ditentukan, akan tetapi juga terdapat pula beberapa indikator yang belum dapat terukur secara pasti karena dilihat dari segi kemanfaatan dan dampak dari masing-masing kegiatan hanya dapat dilihat dalam jangka waktu yang panjang.

Adapun Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga s/d tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel *TC 29* sebagai berikut :

TABEL TC - 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga

	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		5 tahun		2021	2022	2022	2022	2023	2023	
	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja,Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti,Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan	100	%	NA	100	100	100,00	100	100,00	100
	Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100	%	NA	100	100	100,00	100	100,00	100
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	NA	2	2	100,00	2	100,00	100
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Dok	NA	6	6	100,00	6	100,00	100
	Persentase temuan pengelolaan Anggaran yang	100	%	NA	100	100	100,00	100	100,00	100
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	24	Org/Bln	NA	24	24	100,00	24	100,00	100
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas	200	Dok	NA	280	280	100,00	200	100,00	100
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	NA	NA	NA	NA	300	100,00	100
	tersedianya honor admin simda dan sim aset	1	tahun	NA	12	12	100,00	100	100,00	100
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	NA	NA	NA	0,00	1	100,00	100

terlaksananya adminstrasi umum penunjang operasional kantor	12	bln	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	paket	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	paket	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Tersedianya surat kabar dan majalah	12	bln	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	NA	12	12	100,00	1	100,00	100
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bln	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Laporan	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bln	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	12	bln	NA	12	12	100,00	12	100,00	100
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28	unit	NA	28	28	100,00	28	100	100
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	unit	NA	1	1	100,00	1	100	100,00

prosentase desa yang melakukan kerjasama aktif (baik kerjasama antardesa dan desa dengan pihak ketiga)	83,04	%	NA	42,86	40	93,33	70,93	55,465	67
Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antardesa	186	desa	NA	42,86	40	93,33	70,93	55,465	30
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	93	Dok	NA	63	37	58,73	73	55	59
Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	93	Dok	NA	82	6	7,32	86	46	49
Prosentase Desa tertib administrasi pemerintahan Desa	58,2	%	NA	NA	56	70,00	44,85	50,425	87
Cakupan Desa yang difasilitasi tertib administrasi pemerintah desa	58,2	%	NA	25	25	-	44,85	34,925	60
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	10	Desa	NA	10	10	100,00	10	10	100
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	224	Desa	NA	224	224	100,00	224	224	100
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	224	Desa	NA	224	224	100,00	224	224	100
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	18	Orang	NA	18	54	100,00	18	36	200
Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	3	Dokumen	NA	3	3	100,00	3	3	100
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	224	Dokumen	NA	168	204	121,43	178	191	85

	Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10	Laporan	NA	NA	0	-	20	10	100
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	239	Dokumen	NA	239	239	100,00	239	239	100
	Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	3	Dokumen	NA	NA	0	-	3	1,5	50
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	224	Dokumen	NA	0	0	-	73	36,5	16
	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	18	Orang	NA	0	0	-	18	9	50
	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3	Dokumen	NA	3	3	100,00	3	3	100
	Prosentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	63,44	%	NA	62,61	60	95,83	63,02	61,51	97
	Prosentase lembaga kemasyarakatan yang dibina di tingkat kab.Purbalingga	63,44	%	NA	62,61	60	95,83	63,02	61,51	97
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5512	Lembaga	NA	354	452	127,68	5476	2964	54

	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	25	Dokumen	NA	212	45	21,23	21	33	132
	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	19	Laporan	NA	10	1	10,00	11	6	32
	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	10	Laporan	NA	234	3	1,28	10	6,5	65
	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	239	Dokumen	NA	239	239	100,00	239	239	100

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga yang berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan melalui Perjanjian Kinerja yang telah dibuat bersama, serta rencana capaian IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Indikator Kinerja Kunci yang dikaji terkait dengan kinerja pelayanan sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga, dijabarkan dalam indikator program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Adapun untuk pencapaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga dan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021 – 2026, sampai dengan tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel *T.C. 30* sebagai berikut :

Tabel T.C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DINPERMASDES

Kabupaten Purbalingga

RENJA 2025

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n-2)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun s.d Triwulan I N	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Analisa
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2023	2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Desa**												
	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prosentase Temuan Laporan Yang Ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prosentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Layanan Umum, dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B	**Program Penataan Desa**												
	Prosentase desa yang difasilitasi terkait penyelenggaraan penataan desa			NA	NA	70,54%	72,32	NA	NA				
C	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**												
	Prosentase Desa yang melakukan kerja sama aktif antar desa maupun dengan pihak ke tiga												
D	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**												
	Prosentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Desa			NA	44,85	48.15	51.15						
E	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**												
	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina			62,61	63.02	63.14	63.25						

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

a. Tingkat kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.

Dalam rangka pelayanan kinerja Dinpermasdes pada Renja Tahun 2025, didukung dengan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga sebanyak 22 orang meliputi :

1. Kepala Dinas 1 orang
2. Sekretaris Dinas 1 orang
3. Kasubag Pelayanan OPD 2 orang
4. Kepala Bidang Teknis 3 orang
5. Sub Koordinator 4 orang
6. JFU / Staf 8 orang
7. PTT/THL 8 orang

b. Permasalahan

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Belum tergalinya potensi Desa secara optimal yang meliputi : potensi ekonomi ,sosial, dan sumber daya manusia
2. Peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui Kelembagaan Masyarakat Desa belum optimal
3. Administrasi dan Tata kelola Pemerintahan Desa perlu ditingkatkan
4. Kurangnya Sarana dan Prasarana Desa

Adapun beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi :

1. Minimnya jumlah aparatur pelaksana tugas dan terbatasnya sarpras sebagai penunjang pelaksanaan tugas di Dinpermasdes
2. Belum meratanya kemampuan/kapasitas aparatur dinpermasdes
3. Minimnya kreatifitas dan inovasi aparatur

c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah :

Dari permasalahan dan hambatan sebagaimana diuraikan di atas, maka dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah,

khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermasdes yaitu *"Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan*

perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa" diantaranya yaitu :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan tertib administrasi desa
2. Rendahnya partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa
3. Rendahnya kemampuan desa dalam menggali dan mengembangkan potensi desa.

d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan perangkat daerah:

Tantangan :

Tantangan yang dihadapi Dinpermasdes dalam meningkatkan pelayanan antara lain :

1. Mampu memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas dengan keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana.
2. Pencapaian target kinerja yang optimal sesuai dengan Renstra dan Renja Dinpermasdes dengan keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana

Peluang :

1. Adanya dukungan regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinpermasdes.
2. Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermasdes
3. Adanya dukungan teknologi yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinpermasdes.

1. Tingkat kemandirian Desa sebagai Basis Pertumbuhan dan Keadilan
2. Peningkatan status desa dari desa berkembang menjadi desa maju dan mandiri.
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
4. Peningkatan tertib administrasi desa
5. Peningkatan ekonomi desa melalui pengembangan kawasan dan kerjasama desa
6. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa
7. Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga, RPJMD Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem pembangunan nasional. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan RENSTRA SKPD dan RKPD setiap tahunnya.

Dalam penyusunan RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara patrisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan.

Namun demikian tentu masih terdapat berbagai hal yang perlu ditindaklanjuti dengan menyesuaikan beberapa hal yang berkembang selama periode berikutnya, Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2024 harus senantiasa berpedoman pada RENSTRA Dinpermasdes kabupaten PurbalinggaTahun 2021 - 2026 guna menghasilkan rumusan strategi yang terarah, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang sudah ditetapkan dan menjadi rencana prioritas pembangunan pemerintah kabupaten Purbalingga tahun 2024 dalam urusan wajib non pelayanan dasar dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi tupoksi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat disajikan dalam *tabel T.C. 31* sebagai berikut :

Tabel T.C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023 KABUPATEN PURBALINGGA

Renja 2024

Nama Perangkat Daerah : DINPERMASDES

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten Purbalingga**	Purbalingga	Persentase ketersediaan laporan kinerja	100%	**3.572.652.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten Purbalingga**	Purbalingga	Persentase ketersediaan laporan kinerja	100%	**3.667.173.000**	
1.	**Perencanaan,Pengganga ran dan Evaluasi**	Purbalingga	Prosentase ketersediaan laporan kinerja	100%	4.568.000	**Perencanaan,Pengga ngaran dan Evaluasi**	Purbalingga	Prosentase ketersediaan laporan kinerja	100%	4.568.000	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Purbalingga	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2.493.000	**Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah**	Purbalingga	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2.493.000	
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Purbalingga	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2.075.000	**Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	Purbalingga	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2.075.000	
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Purbalingga	Prosentase temuan pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	**3.105.957.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Purbalingga	Prosentase temuan pengelolaan Anggaran yang	100%	**3.105.957.000**	
1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Purbalingga	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bula n	3.001.238.000	**Penyediaan gaji dan tunjangan ASN**	Purbalingga	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	3.001.238.000	
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	71.200.000	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	Purbalingga	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	71.200.000	
3.	Koordinasi dan pelaksanakan Akutansi SKPD	Purbalingga	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	33.519.000	**Koordinasi dan pelaksanakan Akutansi SKPD**	Purbalingga	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	33.519.000	
3.	**Adminstrasi barang Milik daerah pada Perangkat Daerah**	Purbalingga	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	**2.283.000**	**Adminstrasi barang Milik daerah pada Perangkat Daerah**	Purbalingga	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	**2.283.000**	

1.	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Purbalingga	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2.283.000	**Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD**	Purbalingga	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2.283.000	
4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Purbalingga	terrlaksanaya administrasi umum penunjang	100%	**36.741.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Purbalingga	terrlaksanaya administrasi umum penunjang	100%	36.741.000	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Purbalingga	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1.502.000	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik**	Purbalingga	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1.502.000	
2.	Penyediaan bahan Logistik kantor	Purbalingga	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	23.453.000	**Penyediaan bahan Logistik kantor**	Purbalingga	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	23.453.000	
3.	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Purbalingga	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	996.000	**Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	Purbalingga	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	2.400.000	
4.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Purbalingga	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4.150.000	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	Purbalingga	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4.150.000	
5.	penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Purbalingga	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4.150.000	**penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD**	Purbalingga	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4.150.000	
6.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Purbalingga	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan	2.490.000	**Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**	Purbalingga	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Laporan	2.490.000	

5.	**Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah daerah**	Purbalingga	Tersedianya jasa penunjang urusan daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan daerah	227.281.000	**Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah daerah**	Purbalingga	Tersedianya jasa penunjang urusan daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan daerah	232.260.000	
1.	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Purbalingga	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	558.000	**Penyediaan Jasa Surat-menyurat**	Purbalingga	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	558.000	
2.	Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Purbalingga	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	47.040.000	**Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya Air dan Listrik**	Purbalingga	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	47.040.000	
3.	Peralatan dan Perlengkapan kantor	Purbalingga	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	3.533.000	**Peralatan dan Perlengkapan kantor**	Purbalingga	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	8.512.000	
4.	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Purbalingga	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	176.150.000	**Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor**	Purbalingga	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	176.150.000	
6.	**Pemeliharaan barang Milik daerah**	Purbalingga	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**195.822.000**	**Pemeliharaan barang Milik daerah**	Purbalingga	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	163.734.000	
1.	penyediaan Jasa pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan kendaraan Operasional atau Lapangan	Purbalingga	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	178.563.000	penyediaan Jasa pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan kendaraan Operasional atau Lapangan	Purbalingga	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	**109.214.000**	
2.	Pemeliharaan Peralatan dan mesinnya lainnya	Purbalingga	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Unit	6.053.000	Pemeliharaan Peralatan dan mesinnya lainnya	Purbalingga	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Unit	27.520.000	
3	Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan kantor	Purbalingga	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	11.206.000	**Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan kantor**	Purbalingga	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	27.000.000	

II	**Program Penataan Desa**	Purbalingga	Prosentase desa yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penataan desa		19.505.000	**Program Penataan Desa**	Purbalingga	Prosentase desa yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penataan desa		43.000.000
1.	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	Purbalingga	Prosentase desa yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penataan desa		19.505.000	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	Purbalingga	Prosentase desa yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penataan desa	0	43.000.000
1.	fasilitasi tata Wilayah Desa	Purbalingga	Terlakasananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa		2.490.000	**fasilitasi tata Wilayah Desa**	Purbalingga	Terlakasananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	0	6.000.000
2	Fasilitasi penataan kewenangan Desa	Purbalingga	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa		2.490.000	**Fasilitasi penataan kewenangan Desa**	Purbalingga	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	0	6.000.000
3	Fasilitasi Sarana dan prasaran Desa	Purbalingga	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa		14.525.000	**Fasilitasi Sarana dan prasaran Desa**	Purbalingga	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	0	31.000.000
III	**Program peningkatan Kerjasama Desa**	Purbalingga	Prosentase desa yang melakukan kerjasama aktif baik antar desa dan dengan pihak ketiga		69.515.000		Purbalingga	Prosentase desa yang melakukan kerjasama aktif baik antar desa dan dengan pihak ketiga	0	197.500.000
1.	**Fasilitasi Kerjasama Antardesa**	Purbalingga	*Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa*		69.515.000	**Fasilitasi Kerjasama Antardesa**	Purbalingga	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa	0	197.500.000
1	Fasilitasi Kerjasama Antardesa dalam Kab/Kota	Purbalingga	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten		7.677.000	**Fasilitasi Kerjasama Antardesa dalam Kab/Kota**	Purbalingga	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten	0	18.500.000
2	Fasilitasi Kerjasama Antardesa dengan pihak ketiga dalam Kab/Kota	Purbalingga	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga (termasuk TMMD)		61.838.000	**Fasilitasi Kerjasama Antardesa dengan pihak ketiga dalam Kab/Kota**	Purbalingga	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga (termasuk TMMD)	0	179.000.000

IV	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	Purbalingga	Persentase Desa tertib administrasi Pemerintah Desa		538.408.000	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	Purbalingga	Persentase Desa tertib administrasi Pemerintah Desa	0	724.841.000	
1	**Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi desa**	Purbalingga	*1.Cakupan Desa yang difasilitasi tertib administrasi Pemerintah Desa 2. Cakupan Desa yg melaksanakan perencanaan dan penganggaran tepat waktu 3.Cakupan Desa/kelurahan yg menyusun laporan profil desa tepat waktu*		538.408.000	**Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi desa**	Purbalingga	1.Cakupan Desa yang difasilitasi tertib administrasi Pemerintah Desa 2. Cakupan Desa yg melaksanakan perencanaan dan penganggaran tepat waktu 3.Cakupan Desa/kelurahan yg menyusun laporan profil desa tepat waktu	0	724.841.000	
1	**Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Purbalingga	*Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*		10.375.000	**Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Purbalingga	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	0	10.375.000	
2	Penyusunan Produk Hukum Desa	Purbalingga	desa yang di fasilitasi penyusunannya		3.776.000	**Penyusunan Produk Hukum Desa**	Purbalingga	Jumlah Produk hukum desa yang di fasilitasi	0	9.100.000	
3	Fasilitasi Peny. Perencanaan Pembangunan Desa	Purbalingga	Jumlah Desa yg difasilitasi pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan desa		9.390.000	**Fasilitasi Peny. Perencanaan Pembangunan Desa**	Purbalingga	Jumlah Desa yg difasilitasi pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan desa	0	22.625.000	
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Purbalingga	Jumlah desa yg di fasilitasi pengelolaan keuangan, siskeudes		192.836.000	**Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	Purbalingga	Jumlah desa yg di fasilitasi pengelolaan keuangan, siskeudes	0	253.325.000	

5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Purbalingga	Jumlah Pelatih/Trainer Kecamatan yang siap memberi Bintek		238.286.000	**Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**	Purbalingga	Jumlah Pelatih/Trainer Kecamatan yang siap memberi Bintek	0	222.250.000	
6	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Purbalingga	Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi		4.748.000	**Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa**	Purbalingga	Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi	0	11.441.000	
7	pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan lembaga Kerjasama antardesa	Purbalingga	Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam pembentukanBUMdes, LKD dan BKAD		17.577.000	**pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan lembaga Kerjasama antardesa**	Purbalingga	Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam pembentukanBUMdes, LKD dan BKAD	0	50.853.000	
8	Penyelenggaraan pemilihan,Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Purbalingga	Jumlah desa yg di fasilitasi Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		8.300.000	**Penyelenggaraan pemilihan,Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa**	Purbalingga	Jumlah desa yg di fasilitasi Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0	20.000.000	
9	Penyelenggaraan pemilihan,Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Purbalingga	Jumlah desa yg di fasilitasi Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		4.150.000	**Penyelenggaraan pemilihan,Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa**	Purbalingga	Jumlah desa yg di fasilitasi Penyelenggaraan pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	10.000.000	
10	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Purbalingga	Jumlah pendampingan inputing data profil		8.944.000	**Fasilitasi Penyusunan Profil Desa**	Purbalingga	Jumlah pendampingan inputing data profil	0	21.551.000	
11	fasilitasi manajemen Pemerintahan Desa	Purbalingga	Jumlah Permasalahan desa yang terselesaikan		10.375.000	**fasilitasi manajemen Pemerintahan Desa**	Purbalingga	Jumlah Permasalahan desa yang terselesaikan	0	25.000.000	
12	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Purbalingga	Jumlah desa yang di fasilitasi pengelolaan aset desa		4.150.000	**Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa**	Purbalingga	Jumlah desa yang di fasilitasi pengelolaan aset desa	0	10.000.000	
13	pembinaan Peningkatan Kapasitas BPD	Purbalingga	Jumlah Pelatih/Trainer Kecamatan yang siap memberi bintek		6.225.000	**pembinaan Peningkatan Kapasitas BPD**	Purbalingga	Jumlah Pelatih/Trainer Kecamatan yang siap memberi bintek	0	22.250.000	
14	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Purbalingga	Jumlah desa yg mengikuti pelaksanaan lomba desa tingkat kabupaten		19.276.000	**Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan**	Purbalingga	Jumlah desa yg mengikuti pelaksanaan lomba desa tingkat kabupaten	0	46.446.000	

V	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ,Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat**	Purbalingga	Presentase lembaga kemasyarakatan aktif (pengurus, anggaran, program kerja, dan pertemuan)		489.672.000	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ,Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat**	Purbalingga	Presentase lembaga kemasyarakatan aktif (pengurus, anggaran, program kerja, dan pertemuan)	0	1.057.151.000	
1	**Pemberdayaan lembaga kemasyarakatanyang bergerak ,dibidang pemberdayaan Desa dan lembaga adata Tingakat kab/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat**	Purbalingga	*Presentase lembaga kemasyarakatan yg dibina tingkat kabupaten*		489.672.000	**Pemberdayaan lembaga kemasyarakatanyang bergerak ,dibidang pemberdayaan Desa dan lembaga adata Tingakat kab/kota serta Pemberdayaan**	Purbalingga	Presentase lembaga kemasyarakatan yg dibina tingkat kabupaten	0	1.057.151.000	
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagan ,lembaga kemasyarakatan , Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat	Purbalingga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yg dibina		42.592.000	**Peningkatan Kapasitas Kelembagan ,lembaga kemasyarakatan , Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat**	Purbalingga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yg dibina	0	322.625.000	
2	Fasilitasi penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan lemabga Masyarakat		Jumlah Sarana dan Prasarana		20.751.000		Purbalingga	Jumlah Sarana dan Prasarana	0	20.751.000	
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa meningkatkan pendapatan Asli Desa	Purbalingga	Jumlah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang dibina		8.550.000	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa meningkatkan pendapatan Asli Desa**	Purbalingga	Jumlah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang dibina	0	18.550.000	

4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Purbalingga	Jumlah Posyantekdes yg dibina		17.226.000	**Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna**	Purbalingga	Jumlah Posyantekdes yg dibina	0	**125.653.000**	
5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Purbalingga	Jumlah kegiatan gebrak gotong royong dan BBGRM		66.322.000	**Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong**	Purbalingga	Jumlah kegiatan gebrak gotong royong dan BBGRM	0	285.341.000	
6	Fasilitasi kelembagaan Tim Penggerak PKK penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Purbalingga	Jumlah Kelembagaan PKK Desa/Kel yang dibina		334.231.000	**Fasilitasi kelembagaan Tim Penggerak PKK penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**	Purbalingga	Jumlah Kelembagaan PKK Desa/Kel yang dibina	0	284.231.000	
			J U M L A H		**4.689.752.000**			**J U M L A H**		**5.689.665.000**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik pemerintahan desa dan kelompok masyarakat yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga melalui forum Musrenbang Kecamatan maupun musrenbang Kabupaten menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan Program dan Kegiatan untuk Rencana Kerja tahun berjalan dengan mempertimbangkan prioritas Program dan Kegiatan guna pencapaian visi dan misi Kabupaten Purbalingga.

Secara garis besar kegiatan yang diusulkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

- Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyakarat Desa
- Sarana dan Prasarana Kelembagaan Masyarakat Desa berupa : pembangunan gedung Posyandu, PKK, LPMD, Karang Taruna

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pengertian pembangunan Nasional menurut Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional meliputi pembangunanan pusat dan daerah. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakn oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pada rencana awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dilaksanakan dengan Visi " Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong" Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai NAWACITA Kedua. Pembangunan wilayah Perdesaan tercantum dalam misi ketiga yakni Pembanguan yang merata dan Berkeadilan antara lain dengan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Terkait penelaahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pembangunan di Perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di desa dengan mendorong desa-desa agar lebih mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Keberhasilan pembangunan tingkat desa akan mendorong dan berimbas pada kemajuan dan keberhasilan Pembangunan Daerah. Sehingga dibutuhkan koordinasi antar pelaku pembangunan yaitu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.Koordinasi pelaku pembangnan juga mencakup antara pelaksana dengan perencana

pembangunan sehingga mampu tercitanya integrasi, sinkronisasi dajn sinergi baik antar daerah, anatar ruang, antar waktu dan antar fungsi Pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan patrisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mengacu pada review RENSTRA Dinpermasdes periode 2021 - 2026. Amanat yang dipahami dan semangat yang dibangun adalah untuk terus mempercepat pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan untuk kesejahteraan masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berakhlakul karimah.

Untuk mengimplementasikan strategi dirumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga diantaranya :

1. Mendorong peningkatan kualitas pemerintahan dan administrasi desa
2. Mendorong peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat desa
3. Mendorong peningkatan keswadayaan desa melalui pembinaan ekonomi desa dan pengembangan kawasan perdesaan dan kerjasama antar desa
4. Mendorong peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINPERMASDES TAHUN 2025

Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga disusun dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Masih perlunya fasilitasi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan tertib administrasi desa
2. Masih perlunya dorongan dan motivasi dalam peningkatan ekonomi pedesaan melalui Penataan desa, Pengembangan BUMDES, Kerjasama Desa dan pembangunan kawasan perdesaan, pengembangan Pasar desa dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
3. Perlunya fasilitasi penyaluran dana-dana bagi Pemerintah Desa, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.
4. Perlunya upaya menggali dan mendorong keswadayaan masyarakat desa melalui pengembangan gotong royong masyarakat.
5. Adanya tugas-tugas lain yang diberikan atasan
6. Adanya amanat undang-undang serta peraturan lainnya yang mengikat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan berpedoman pada RENSTRA Dinpermasdes 2021-2026, maka rencana dan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2025 terdiri dari Belanja Operasi tertuang dalam 5 Program dan 11 kegiatan yang terbagi menjadi 45 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Program ini merupakan program rutin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga bertujuan untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sbb:

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah rencana anggaran sebesar Rp.1.994.000,00 (tetap) untuk penyusunan dokumen perencanaan Dinpermasdes.
   b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah rencana anggaran Rp.1.660.000 (tetap) untuk penyusunan dokumen evaluasi dan laporan kinerja Dinpermasdes.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 2.813.371.000 (tetap) yang dipergunakan untuk membayar 24 orang ASN Dinpermasdes
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp.57.640.000 (tetap) untuk membayar perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah menghadiri undangan Rapat-rapat, melaksanakan koordinasi, pembinaan dan kunjungan lapangan, baik dari Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa.
   c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp. 23.900.000 (tetap) yang dipergunakan untuk membayar honor pengelolaan keuangan yang meliputi 1 orang PA, 1 orang PPK, 1 orang Bendahara Pengeluaran, 6 orang PPTK, 12 orang, Bendahara Pembantu.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Penatausahaan Barang Milik Daerah Rp. 1.826.000,00 (tetap) yang dipergunakan untuk membayar honor 1 orang pengurus barang dan 1 orang PPKom.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 4.000.000

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 1.240.000 (tetap) yang dipergunakan untuk membeli peralatan instalasi listrik/penerangan bangunan.
   b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 19.910.000 (tetap) yang dipergunakan untuk membeli perlengkapan logistik kantor berupa : ATK, Kertas, Cover, Bahan-bahan komputer, Alat/bahan/perabot kantor, alat-alat kebersihan, bendera, dll.
   c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 960.000,- (tetap) yang dipergunakan untuk membayar biaya langganan koran
   d. Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp. 3.820.000,- dipergunakan untuk membayar biaya jamuan tamu, baik tamu dari wilayah kabupaten, kecamatan, desa, maupun tamu dari Provinsi maupun Pusat selama 12 bulan.
   e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Rp. 3.820.000,- yang dipergunakan untuk membayar konsumsi rapat-rapat koordinasi selama 12 bulan.
   f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Rp. 2.490.000,- yang digunakan untuk membayar honor 1 orang pengelola pengelola SIM ASET, 1 orang Admin SIMDA, dan 1 orang Koordinator Operator SIPD

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 300.000,- (tetap) yang dipergunakan untuk membayar biaya pengiriman surat, paket, dll.
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp.50.976.000,- (tetap) yang dipergunakan untuk membayar langganan telepon, internet dan PDAM.
   c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.3.826.000,- yang dipergunakan untuk membayar iuran pengelolaan sampah, Pajak Bumi dan Bangunan, Sewa peralatan, dll selama 12 bulan.
   d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 189.990.000 yang dipergunakan untuk membayar honor 1 orang tidak tetap SK Bupati dan 7 orang pegawai tidak tetap SK KAdin, dan untuk Tahun 2024 ada tambahan THL 3 orang (operator komputer 2 orang (SLTA & D3) dan 1 orang tenaga kebersihan krn tenaga yang ada pensiun)
   e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Rp. 141.350.000 untuk membayar bahan bakar kendaraan dinas roda dua : 10 unit dan roda empat : 6 unit.
   f. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 4.842.000,- untuk pemeliharaan 10 unit AC, 7 Unit Laptop, 9 Unit PC dan 12 unit Printer yang kondisinya sering rusak.
   g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 5.000.000 untuk pemeliharaan gedung dan halaman kantor, penambahan anggaran diperlukan untuk perbaikan atap, genteng dan plafond ruang Bidang PAD yang rusak berat.

B. Program Penataan Desa, terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sbb:

1. Penyelenggaraan Penataan Desa

   a. Fasilitasi Tata Wilayah Desa, dengan indikator kinerja terlaksananya fasilitasi penataan wilayah desa, anggaran sebesar Rp. 1.992.000- yang digunakan untuk membayar belanja ATK, rapat-rapat konsultasi/koordinasi dan Perjalanan Dinas dalam kota

   b. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa, dengan indikator terlaksananya fasilitasi penataan kewenangan desa, anggaran sebesar Rp. 1.992.000,- yang dipergunakan ATK dank Kertas , rapat-rapat konsultasi/koordinasi dan Perjalanan Dinas dalam Kota

   c. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa, dengan indikator kinerja terfasilitasinya sarana dan prasarana desa, anggaran sebesar Rp.11.620.000,- yang dipergunakan untuk fasilitasi penyaluran dana BKK Kabupaten dan Bantuan Gubernur untuk Sarana dan Prasarana Perdesaan, berupa rapat-rapat koordinasi, penjelasan pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban keuangan, serta pengiriman berkas pencairan dan LPJ ke Provinsi Jawa Tengah.

C. Program Peningkatan Kerjasama Desa terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sbb :

1. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

   a. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten, anggaran Rp. 6.142.000 untuk penyusunan regulasi, rapat-rapat konsultasi/koordinasi, baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi, ceking lapangan/pendampingan ke desa, sehingga kerjasama yang dilakukan oleh desa didukung oleh dokumen kerjasama yang sah sesuai ketentuan.

   b. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga, dengan indikator kinerja terlaksananya fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga, anggaran Rp. 49.270.000 untuk fasilitasi

pelaksanaan kegiatan TMMD di 3 desa dan fasilitasi penerbitan dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga sesuai ketentuan. Fasilitasi yang dilakukan antara lain dengan penyusunan regulasi, rapat koordinasi/konsultasi, pembinaan, dan pendampingan.

C. Program Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sbb :

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa
   a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa dengan indicator Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000 kegiatan Belanja ATK,Kertas, Rapat-rapat Fasilitas**i** Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah,Perjalanan Dinas Luar Kota
   b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa, dengan Indikator Jumlah Dokumen hasil penyusunan produk hukum desa, anggaran sebesar Rp. 3.021.000 kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyusunan regulasi, rapaSt kordinasi/konsultasi, pembinaan dan pendampingan penyusunan dan penerbitan produk hukum desa seperti Perdes dan Perkades, baik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa maupun yang lain.
   c. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, anggaran Rp. 7.512.000,- kegiatan yang dilaksanakan Sosialisasi Musrenbangdes kepada semua desa lewat Kecamatan, pendampingan pelaksanaan Musrenbangkec dan Musrenbangdes, serta pendampingan penyusunan dokumen perencanaan desa, sehingga tersusun RKPDes dan RAPBDes dari 224 desa sesuai ketentuan.
   d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengelolaan keuangan desa, anggaran sebesar Rp. 180.189.000,00 dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain Sosialisasi DD/ADD, pendampingan inputing

Siskeudes, Bimbingan Teknis dan Pelatihan, monitoring ke desa-desa serta pemberian bantuan transport untuk para Pendamping Desa di Kabupaten Purbalingga, sehingga tersedia dokumen pengelolaan desa yang benar sesuai ketentuan di 224 desa.

e. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, indikator kinerja Jumlah Pelatih/Trainer yang siap memberi bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, rencana anggaran sebesar Rp. 130.000.000 untuk kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pelatih Tingkat Kecamatan yang selanjutnya akan memberikan Bimbingan Teknis kepada desa-desa di wilayahnya, serta pemberian penghargaan kepada desa-desa yang memiliki potensi dan prestasi.

f. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa**.**

Indikator kinerja adalah Jumlah Dokumen hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa . Rencana anggaran sebesar Rp 3.798.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga untuk kegiatan Belanja ATK, Kertas, Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas dalam daerah .

g. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa.

Indikator kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES dan Lembaga Kerjasama antar Desa, Rencana anggaran Rp. 14.062.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja ATK, Kertas, Bahan Komputer ,Rapat-rapat serta Perjalanan dinas dalam dan Luar daerah

h. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Indikator kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

, Rencana anggaran Rp. 140.804.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja ATK, Kertas, Bahan Komputer ,Rapat-rapat serta Perjalanan dinas dalam dan Luar daerah

i. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

j. Indikator kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Rencana anggaran Rp. 10.000.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja ATK, Kertas, Bahan Komputer ,Rapat-rapat serta Perjalanan dinas dalam dan Luar daerah

k. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa.

Indikator kinerja yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Profil Desa . Kegiatan tersebut berupa pelatihan dan pendampingan inputing data pelaporan profil desa. Rencana anggaran sebesar Rp 7.155.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

l. Fasilitasi manajemen Pemerintahan Desa

Indikator kinerja yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Manajemen Pemerintahan Desa . Sub Kegiatan tersebut fasilitasi penyelesaian yang dihadapi Pemerintah Desa. Rencana anggaran sebesar Rp 8.300.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

m. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.

Indikator kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan aset desa , Rencana anggaran Rp. 3.320.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga

n. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD.

Indikator yang ditetapkan kegiatan ini adalah Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan kapasitas sebanyak 18 orang dengan anggaran Rp 14.940.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

o. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

Indikator Kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa yakni Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan . Rencana Kebutuhan dana sebesar Rp. 15.421.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

D. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terdiri dari :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat.

   Indikator kinerja yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya sejumlah 5112 lembaga , Rencana Anggaran Rp 3.763.107.000- yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

2. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat

   Indikator Kinerja sub kegiatan tersebut yaitu Jumlah sarana dan Prasarana kelembagaan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat dengan besaran Anggaran Rp. 16.601.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten.

3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

   Indikator kinerja yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan

Asli Desa. Rencana Anggaran Rp 6.840.000- yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga

4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat guna.Indikator Kinerja yang ditetapkan pada sub kegiatan pemanfaatan dan pengenalan TTG adalah Jumlah Laporan hasil Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat guna Fasilitasi Rencana anggaran sebesar Rp. 13.781..000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.
5. Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat.

   Indikator Kinerja yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil laporan hasil Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyrakat . Rencana anggaran sebesar Rp 166.094.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.
6. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

   Indikator Kinerja yang ditetapkan pada sub kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga . Rencana anggaran sebesar Rp 417.111.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

Adapun rumusan program dan kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju tahun 2025 OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat disajikan sebagaimana Tabel *T.C. 33* sebagai berikut :

Tabel T.C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinpermasdes

Kabupaten Purbalingga

Kode				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**02**	**01**	**01**	**Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja,Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti,Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah,Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**Purbalingga**	**100%**	**3,332,915,000**	**APBD**		**100%**	**3,512,613,000**
01	**02**	**01**	**01**	**Perencanaan, Pengganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan**	**Purbalingga**	**6 dokumen**	**3,654,000**			**6 dokumen**	**3,654,000**
01	02	01	07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pelaporan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	2 dokumen	1,994,000	APBD		2 dokumen	2,493,000

01	02	02	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	4 dokumen	1,660,000	APBD		4 dokumen	2,075,000
01	**02**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Prosentase Temuan Anggaran yang Ditindaklanjuti**	**Purbalingga**	**100%**	**2,894,911,000**			**100%**	**3,105,957,000**
01	02	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingga	21 Orang / Bulan	2,813,371,000	APBD		21 Orang / Bulan	3,001,238,000
01	02	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	50 dokumen	57,640,000	APBD		50 dokumen	71,200,000
01	02	2	04	Koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purbalingga	200 dokumen	23,900,000	APBD		200 dokumen	33,519,000
01	**02**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Purbalingga**	**100%**	**1,826,000**	**APBD**		**100%**	**2,283,000**
01	02	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purbalingga	4 laporan	1,826,000	APBD		4 laporan	2,283,000
01	**02**	**05**		**Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian**	**Purbalingga**	**100%**	**4,000,000**	**APBD**		**100%**	**4,000,000**
01	02	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Keg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Purbalingga	1 laporan	4,000,000	APBD		1 laporan	4,000,000
01	**02**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum**	**Purbalingga**	**100%**	**32.240,000**			**100%**	**36,706,000**

01	02	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Purbalingga	12 paket	1,240,000	APBD		12 paket	1,502,000
01	02	06	04	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Purbalingga	7 paket	19.910,000	APBD		7 paket	23,454,000
01	02	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Purbalingga	12 dokumen	960,000	APBD		12 dokumen	960,000
01	02	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Purbalingga	12 laporan	3,820,000	APBD		12 laporan	4,150,000
01	02	06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Purbalingga	12 laporan	3,820,000	APBD		12 laporan	4,150,000
01	02	06	09	Dukungan pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Purbalingga	4 bulan	2.490.000	APBD		4 bulan	2,490,000
01	**02**	**07**		**Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintahan daerah**	**Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Purbalingga**	**100%**	**245,092,000**			**100%**	**241,153,000**
01	02	07	06	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purbalingga	12 laporan	300,000	APBD		12 laporan	1,345,000
01	02	08	01	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Purbalingga	12 laporan	50,976,000	APBD		12 laporan	45,000,000

01	02	08	02	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Purbalingga	12 laporan	3,826,000	APBD		12 laporan	8,512,000
01	02	08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Purbalingga	12 laporan	189,990,000	APBD		12 laporan	186,296,000
01	**02**	**09**		**pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintah daerah**		**Purbalingga**		**151.192,000**	**APBD**			**122,860,000**
01	02	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Purbalingga	16 unit	141.350,000	APBD		16 unit	**113,018,000**
01	02	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Purbalingga	20 unit	4,842,000	APBD		20 unit	4,842,000
01	02	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Purbalingga	1 unit	5,000,000	APBD		1 unit	5,000,000
2				**Program Penataan Desa**	**Prosentase Desa yang Difasilitasi Terkait dengan Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Purbalingga**	**20%**	**15,604,000**	**APBD**		**20%**	**15,604,000**
02	02	01		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Purbalingga		15,604,000	APBD			15,604,000
02	02	01	02	Fasilitasi tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Purbalingga	1 desa	1,992,000	APBD		1 desa	1,992,000
02	02	01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangan	Purbalingga	1 desa	1,992,000	APBD		1 desa	1,992,000

02	02	01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Purbalingga	5 unit	11,620,000	APBD		5 unit	11,620,000
03	02			**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Prosentase Desa yang melaksanakan Kerja Aktif**	Purbalingga	**74,75%**	**55,612,000**	**APBD**		**74,75%**	55,612,000
03	02	01		**Fasilitasi Kerja sama Antar Desa**		Purbalingga		**55,612,000**				55,612,000
03	02	01	01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerja sama antar desa dalam kabupaten / kota	Purbalingga	2 dokumen	6,142,000	APBD		2 dokumen	**6,142,000**
03	02	01	02	Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Purbalingga	6 dokumen	49,470,000	APBD		6 dokumen	49,470,000
04	**02**			**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Prosentase Desa yang Tertib Administrasi**	**Purbalingga**	**48,25**	**613,522,000**	**APBD**		**48,25**	**637,206,000**
04	**02**	**01**		**Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**		**Purbalingga**		**613,522,000**	**-**			**637,206,000**
04	02	01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Purbalingga	3 dokumen	75.000,000	**APBD**		3 dokumen	205,175,000
04	02	01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah produk hukum desa yang difasilitasi penyusunannya	Purbalingga	10 dokumen	3,021,000	APBD		10 dokumen	3,021,000
04	02	01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Purbalingga	224 dokumen	7,512,000	APBD		224 dokumen	9,390,000
04	02	01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	Purbalingga	224 dokumen	180,189,000	APBD		224 dokumen	192,836,000
04	02	01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.	Jumlah Pelatih / trainee yang siap memberikan bintek kapasitas peningkatan	Purbalingga	18 orang	130.000.000	APBD		18 orang	150,629,000

04	02	01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa.	Jumlah dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Purbalingga	3 dokumen	3,798,000	APBD		3 dokumen	4,748,000
04	02	01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa.	jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan Bum Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Purbalingga	3 dokumen	14,062,000	APBD		3 dokumen	17,577,000
	02	01	09	Penyelenggaraan,pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Purbalingga	0	140.804.000	APBD		0	-
04	02	01	10	Penyelenggaraan,pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Purbalingga	0	10.000.000	APBD		0	-
04	02	01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa.	Jumlah Dokumen Profil Desa	Purbalingga	224 dokumen	7,155,000	APBD		224 dokumen	8,944,000
04	02	01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Purbalingga	1 dokumen	8,300,000			1 dokumen	10,375,000
04	02	01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Aset Desa.	Purbalingga	2 dokumen	3,320,000	APBD		2 dokumen	4,150,000
04	02	01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	jumlah anggota BPD yang mengikuti bintek	Purbalingga	18 Orang	14,940,000	APBD		18 Orang	14,940,000
05	02	01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Purbalingga	3 dokumen	15,421,000	APBD		3 dokumen	15,421,000
05	**02**			**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Presentase lembaga kemasyarakatan aktif (pengurus, anggaran, program kerja, dan pertemuan)**	**Purbalingga**		**4,383,534,000**	**APBD**			**4,392,839,000**

				Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingakat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase lembaga kemasyarakatan yg dibina tingkat kabupaten**	**Purbalingga**	**63.2**	**4,383,534,000**	**-**		**63.2**	**4,392,839,000**
05	02	01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat.	Jumlah kelembagaan yang ditingkatkan kapasitasnya	Purbalingga	5112 lembaga	3,763,107,000	APBD		5112 lembaga	3,763,107,000
05	02	01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat.	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Purbalingga	10 unit	16,601,000	APBD		10 unit	20,751,000
05	02	01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.	Purbalingga	5 dokumen	6,840,000	APBD		5 dokumen	8,550,000

05	02	01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Purbalingga	1 laporan	13,781,000	APBD		1 laporan	17,226,000
05	02	01	07	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat	Purbalingga	10 laporan	166,094,000	APBD		10 laporan	166,094,000
05	02	01		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Purbalingga	239 dokumen	417,111,000	APBD		239 dokumen	417,111,000
TOTAL								**8,401,187,000**				**8,613,874,000**

Rencana Kerja dan Sumber Pendanaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dapat disajikan sebagaimana Tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN PURBALINGGA

Kode						Urusan/Bidang	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1						2		4	5	6	7
2	13	1				**Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah**		Purbalingga		**3,332,915,000**	**APBD**
2	13	01	2	01		**Perencanaan , Pengganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan**	Purbalingga	100%	**3,654,000**	
2	13	01	2	02	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pelaporan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	2 dokumen	1,994,000	APBD
2	13	01	2	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	4 dokumen	1,660,000	APBD
2	13	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Prosentase Temuan Anggaran yang Ditindaklanjuti**	**Purbalingga**	**100%**	**2,894,911,000**	

2	13	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingga	22 ASN / Bulan	2,813,371,000	APBD
2	13	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	50 dokumen	57,640,000	APBD
2	13	01	2	02	04	Koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purbalingga	200 dokumen	23,900,000	APBD
2	13	01	2	03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Purbalingga	100	**1,826,000**	APBD
2	13	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 laporan	1,826,000	APBD
2	13	01	2	03		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian**		**100%**	**4,000,000**	APBD
2	13	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Keg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		1 laporan	4,000,000	APBD
2	13	01	06			**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum**	Purbalingga	**100%**	**32.240,000**	
2	13	01	02	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Purbalingga	12 paket	1,240,000	APBD

2	13	01	02	06	04	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Purbalingga	7 paket	19.910,000	APBD
2	13	01	02	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Purbalingga	12 dokumen	960,000	APBD
2	13	01	02	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Purbalingga	12 laporan	3,820,000	APBD
2	13	01	02	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Purbalingga	12 laporan	3,820,000	APBD
2	13	01	02	06	11	Dukungan pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Purbalingga	4 bulan	3.820,000	APBD
2	13	01	2	08		**Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Purbalingga	**100%**	**245,092,000**	
2	13	01	2	08	01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purbalingga	12 laporan	300.000	APBD
2	13	01	2	08	02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Purbalingga	12 laporan	50,976,000	APBD

2	13	01	2	08	03	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Purbalingga	12 laporan	3,826,000	APBD
2	13	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Purbalingga	12 laporan	189,990,000	APBD
2	13	01	2	09		**pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintah daerah**		Purbalingga		**151.192,000**	APBD
2	13	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Purbalingga	16 unit	141.350,000	APBD
2	13	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Purbalingga	20 unit	4,842,000	APBD
2	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Purbalingga	1 unit	5,000,000	APBD
2	**13**	**02**				**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Prosentase Desa yang Difasilitasi Terkait dengan Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Purbalingga**	**20%**	**15,604,000**	

2	13	02	2	01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Purbalingga		15,604,000	
2	13	02	2	01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Purbalingga	1 desa	1,992,000	
2	13	02	2	01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangan	Purbalingga	1 desa	1,992,000	
2	13	02	2	01	04	Fasilitasi Sarana dan prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Purbalingga	5 unit	11,620,000	
2	13	03				**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Prosentase Desa yang melaksanakan Kerja Aktif**	Purbalingga	**74,75%**	**55,612,000**	**APBD**
2	2	03	2	01		**Fasilitasi Kerja sama Antar Desa**		Purbalingga		**55,612,000**	**APBD**
2	2	03	2	01	01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerja sama antar desa dalam kabupaten / kota	Purbalingga	2 dokumen	6,142,000	APBD
2	2	03	2	01	02	Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Purbalingga	6 dokumen	49,470,000	APBD
2	13	04				**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Prosentase Desa yang Tertib Administrasi**	Purbalingga	**48,25**	**613,522,000**	**APBD**
2	13	04	2	01		Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Purbalingga		613,522,000	
2	13	04	2	01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Adminstrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Purbalingga	3 dokumen	75.000,000	

2	13	04	2	01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah produk hukum desa yang difasilitasi penyusunannya	Purbalingga	10 dokumen	3,021,000	APBD
2	13	04	2	01	03	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Purbalingga	224 dokumen	7,512,000	APBD
2	13	04	2	01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	Purbalingga	224 dokumen	180,189,000	APBD
2	13	04	2	02	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.	Jumlah Pelatih / trainee yang siap memberikan bintek kapasitas peningkatan	Purbalingga	18 orang	130.000,000	APBD
2	13	04	2	02	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa.	Jumlah dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Purbalingga	3 dokumen	3,798,000	APBD
2	13	04	2	02	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa.	jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan Bum Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Purbalingga	3 dokumen	14,062,000	APBD
2	13	04	2	02	09	Penyelenggaraan,pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Purbalingga	3 Laporan	140.804,000	APBD
2	13	04	2	02	10	Penyelenggaraan,pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Purbalingga	1 Laporan	10.000,000	APBD
2	13	04	2	02	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa.	Jumlah Dokumen Profil Desa	Purbalingga	224 dokumen	7,155,000	APBD

2	13	04	2	02	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Purbalingga	1 dokumen	8,300,000	
2	13	04	2	02	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Aset Desa.	Purbalingga	2 dokumen	3,320,000	APBD
2	13	04	2	02	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	jumlah anggota BPD yang mengikuti bintek	Purbalingga	18 Orang	14.940,000	APBD
2	13	04	2	02	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Purbalingga	3 dokumen	15,421,000	APBD
2	13	05				**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Presentase lembaga kemasyarakatan aktif (pengurus, anggaran, program kerja, dan pertemuan)**	Purbalingga		**4,383,534,000**	**APBD**
2	13	05	2	01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat kabupaten /Kota serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama pelakunya	**Presentase lembaga kemasyarakatan yg dibina tingkat kabupaten**	Purbalingga	**63.2**	4,383,534,000	

2	13	05	2	01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat.	Jumlah kelembagaan yang ditingkatkan kapasitasnya	Purbalingga	5112 lembaga	3,763,107,000	APBD
2	13	06	3	01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Purbalingga	10 unit	16,601,000	APBD

2	13	06	3	01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.	Purbalingga	5 dokumen	6,840,000	APBD
2	13	06	3	01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Purbalingga	1 laporan	13,781,000	APBD
2	13	06	3	01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat	Purbalingga	10 laporan	166,094,000	APBD
2	13	07	4	01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Purbalingga	239 dokumen	417,111,000	APBD
						JUMLAH				**8,401,187,000**	

BAB V
PENUTUP

Ranwal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat OPD, sebagai wujud nyata dan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan daerah. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menampung aspirasi atau masukan-masukan dari berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis partisipatif masyarakat, dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka menciptakan *Good Governance* sesuai dengan paradigma pembangunan saat ini. Dimana pada gilirannya akan mampu menciptakan sebuah kebijakan yang lebih efektif, efisien dan ekonomis yang memiliki dampak lebih besar kepada masyarakat. Dengan demikian kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam program dan kegiatan dapat dirasakan masyarakat, khususnya oleh masyarakat pedesaan maupun masyarakat pada umumnya.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga selain menjadi acuan pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun anggaran 2025, berfungsi pula sebagai sarana dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga sesuai dengan kemampuan sumber daya maupun kemampuan anggaran yang tersedia.

Rencana kerja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa yang akan datang oleh para pimpinan dan seluruh staf OPD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga, sehingga akan memperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya sangat kami harapkan, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Purbalingga.

Demikian Rencana Kinerja (RENJA) ini dususun sebagai untuk dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025, semoga bisa memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Purbalingga, Januari 2024

KEPALA DINPERMASDES
KABUPATEN PURBALINGGA

ATO SUSANTO,A.P,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670706 199311 1 001